

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Setelah melakukan pengkajian dengan pendekatan interdisipliner terhadap permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan kajian yang dilakukan dengan konsep ekonomi seperti depresi ekonomi, latar belakang terjadinya depresi ekonomi 1929 adalah berawal dari kegagalan pasar di tahun 1929 yang menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi masyarakat pada tingkat yang sangat buruk secara berkepanjangan. Depresi ekonomi 1929 dipicu oleh jatuhnya bursa saham NYSE pada Oktober 1929 akibat ledakan spekulatif yang disebut dengan *economic bubble* (gelembung ekonomi). Kenaikan harga saham mengakibatkan terjadinya penjualan saham secara besar-besaran pada bulan Oktober 1929 yang kemudian menyebabkan pasar saham runtuh dan indeks harga saham turun drastis. Instabilitas akibat depresi ini kemudian menghancurkan kondisi perekonomian AS. Angka pengangguran semakin meningkat akibat ketidakmampuan pasar menyerap tenaga kerja dan daya beli masyarakat semakin menurun.

Depresi ekonomi terjadi disaat ekonomi AS sedang mengalami puncak perkembangannya sejak tahun 1920-an. Didukung dengan perkembangan teknologi baru dalam industri, perusahaan berlomba-lomba menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya. Hal ini sesuai dengan teori klasik yang dipercaya

pada saat tersebut bahwa *supply creates its own demand* (penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri). Dengan teori tersebut kaum klasik beranggapan dalam perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran. Teori klasik tersebut tidak dapat dipertahankan dalam kondisi ekonomi di tahun 1929. Produksi yang berlebihan menghasilkan penumpukan barang produksi, sementara konsumen memiliki daya beli yang rendah.

Kedua, mengenai pelaksanaan kebijakan *New Deal* yang telah dikaji secara interdisipliner ilmu politik yaitu dengan mengkaitkannya dengan konsep kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *New Deal* merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden terpilih saat itu mulai dijalankan sejak 100 hari masa pemerintahannya dalam dua tahapan, yaitu *New Deal* tahap pertama dan kedua. Roosevelt dengan otoritas besar yang dimilikinya dengan cepat berusaha mewujudkan janji kampanye presidennya untuk segera menyelesaikan kemelut depresi ekonomi, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan ini adalah mempercepat penyelesaian depresi ekonomi yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat AS. Kebijakan ini dianggap berhasil meningkatkan kembali perekonomian AS, bagi masyarakat seperti kalangan buruh dan petani di AS, kebijakan *New Deal* dianggap sebagai kebijakan yang sangat berpihak pada nasib mereka, karena pemerintah mulai melakukan campur tangan memperbaiki kondisi ekonomi. Keberhasilan tindakan yang dilakukan dalam kebijakan *New Deal* ini terjadi karena Roosevelt mampu melakukan tindakan tepat sasaran dengan prinsip *relief* (bantuan) ia membuka

lapangan kerja sebanyak mungkin, agar dapat mengurangi pengangguran. Kemudian dengan prinsip *recovery* (pemulihan) ia mendirikan berbagai aturan baru dan lembaga-lembaga perekonomian baru yang menata kembali perekonomian AS, serta *reform* (pembaharuan) membuat terobosan baru dengan membuat asuransi dan jaring pengaman sosial bagi kaum miskin yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Program *New Deal* telah menunjukkan sebuah terobosan baru dalam sejarah perkembangan ekonomi AS. *New Deal* juga memelopori cara baru dalam bantuan pada sektor pertanian, pembangunan pembangkit listrik, konservasi, perlindungan sosial, hubungan antar tenaga kerja, dan regulasi bisnis.

Ketiga, berkaitan dengan permasalahan penyimpangan yang terjadi selama masa pelaksanaan program *New Deal* dan perubahan setelahnya, penulis mengkaitkannya dengan beberapa konsep ekonomi dan politik seperti mazhab (klasik, sosialisme, dan keynesian), dan kekuasaan. Program-program yang digulirkan dibawah kebijakan *New Deal* dianggap terlalu jauh menyimpang dari aturan konstitusi AS, kekuasaan pemerintah dianggap berlebihan dalam beberapa program *New Deal* seperti halnya dalam NRA, NIRA, TVA, dan AAA. Pencabutan beberapa program *New Deal* oleh Kongres tersebut tidak membuat Roosevelt menghentikan kebijakannya. Pengaruh kekuasaan eksekutif juga meluas pada tugas Mahkamah Agung, dengan kewenangannya Roosevelt mengusulkan undang-undang yang disebut dengan *to pack court* meminta tambahan hakim agung yang baru, hal ini dimaksudkan agar hadirnya hakim agung yang baru tidak menghambat jalannya kebijakan *New Deal*.

Perubahan besar yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan *New Deal* adalah berubahnya sistem perekonomian yang berlaku, ekonomi klasik sesuai mazhab Adam Smith dianggap tidak lagi sesuai dengan perekonomian AS. Sehingga, mazhab klasik berganti menjadi mazhab Keynes dan sejak saat itu ekonomi campuran (*mixed economy*) mulai diberlakukan. Dalam mekanisme pasar bebas, campur tangan pemerintah sebelum era *New Deal* dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari mazhab liberalisme klasik. Namun, lahirnya kebijakan *New Deal* menjadi awal baru perekonomian AS. Sistem ekonomi baru yang dijalankan merupakan sistem yang lebih mengakui peranan pemerintah dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk turut mengambil keputusan dan perencanaan perekonomian secara mikro dan makro ekonomi. Dalam pelaksanaan kebijakan *New Deal*, nampak jelas terlihat pengaruh yang cukup besar dari kekuasaan eksekutif. Eksekutif mengalami perluasan kekuasaan yang besar akibat legitimasi campur tangan pemerintah yang diperbolehkan demi perbaikan ekonomi. Wewenang penuh diberikan pada eksekutif dalam keadaan ekonomi yang mendesak saat itu. Hadirnya program *New Deal* telah mewujudkan sebuah bentuk legitimasi campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi, melalui kekuasaan eksekutif yang dimiliki presiden.

Keempat, mengenai permasalahan perspektif ideologi liberalisme dan sosialisme dalam kebijakan *New Deal* yang dikaji secara interdisipliner dengan menggunakan konsep politik yaitu ideologi, maka dalam pemahaman ideologi, kebijakan *New Deal* mengalami penafsiran ganda terkait ideologi yang digunakan dari kebijakan ini. AS sebagai negara liberalisme yang kuat dan memegang

prinsip *laissez faire* dengan teguh, pada kondisi darurat ekonomi dengan terjadinya depresi seolah berpaling dari prinsip liberalisme itu sendiri. Tindakan pemerintah terlibat aktif dalam perekonomian adalah hal yang bertentangan untuk dilaksanakan di negara berideologi liberalisme, namun dengan *New Deal* pemerintah dengan *powerfull* mengatur perekonomian baik mikro maupun makro dengan tujuan mendirikan negara kesejahteraan AS. Pemahaman ini ditafsirkan dan dianggap lain oleh beberapa pihak yang mengatakan bahwa Roosevelt saat itu sedang menjalankan kebijakan sosialis dan negara liberalisme, lebih *ekstrem* mereka mengatakan bahwa Roosevelt adalah seorang sosialis yang ingin menjadikan AS sebagai negara sosialis. Pada umumnya, mereka yang menolak kebijakan *New Deal* berasal dari kalangan bisnis dan Partai Republik. Untuk mendapatkan simpati rakyat kembali dalam pemilu-pemilu berikutnya, Roosevelt menjawab bahwa ia hanya ingin menyelamatkan kapitalisme itu sendiri dan bukan ingin menjadikan AS sebagai negara sosialis.